

PENGARUH UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AUDIT DELAY PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2015-2016

Dewi Sarifah Tullah¹⁾, Erma Apriyanti²⁾ dan Fitri Rianti³⁾

¹⁾dewisarifattullah@gmail.com, ²⁾apriyantierma@yahoo.co.id, ³⁾fitriirianti17@gmail.com,

^{1) 2) 3)} STIE Pandu Madania

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the length of audit delay in the Regency / City governments in Indonesia in 2015 and 2016. These factors are regional size, audit opinion and level of regional financial dependence. The population of this study is all districts / cities in Indonesia in 2015 and 2016. The study sample was determined by purposive sampling method. The data used is secondary data. The analytical method used is descriptive statistical analysis and multiple regression statistical analysis. The results showed that the size of the area did not affect audit delay. Audit opinion and the level of regional financial dependence proved to have a significant effect on audit delay. The size of the area does not affect the audit delay because many of the few accounting entities cannot determine the size of the audit delay. Audit opinion has an effect on audit delay because the area that obtains WTP opinion indicates that the region has good governance that will compile financial reports in a timely manner so as to minimize audit delay. The level of regional financial dependency influences audit delay, this is due to the higher regional financial dependence, so that the area will be more obedient to the regulations and will prepare its financial statements in a timely manner so as to minimize audit delay.

Keywords: *Audit Delay, Regional Size, Audit Opinion, Level of Regional Financial Dependence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya audit delay di pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah tidak mempengaruhi audit delay. Opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Ukuran daerah tidak mempengaruhi audit delay karena banyaknya entitas akuntansi tidak dapat menentukan ukuran audit delay. Opini audit berpengaruh terhadap keterlambatan audit karena daerah yang memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tata kelola yang baik yang akan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sehingga dapat meminimalkan audit delay. Tingkat ketergantungan keuangan daerah mempengaruhi audit delay, hal ini disebabkan oleh semakin tingginya ketergantungan keuangan daerah, sehingga daerah akan lebih patuh pada peraturan dan akan menyiapkan laporan keuangannya secara tepat waktu sehingga meminimalkan audit delay.

Kata Kunci : *Audit Delay, Ukuran Daerah, Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah*

Received: 2019-01-07

Revised: 2019-06-29

Accepted: 2019-08-02

To cite this article:

Tullah, D.S., Apriyanti, E., Rianti, F., (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit Dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2015-2016, Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12 (2): 171-185, DOI: 10.22441/profita.2019.v12.02.001

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari akurasi laporan keuangan dan cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh sistem akuntansi mengenai sumberdaya, kewajiban, penghasilan perusahaan dan lainnya (Belkaoui, 2008). Tujuan pelaporan keuangan dalam entitas sektor publik yaitu menyediakan informasi mengenai entitas, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan tersebut, dengan tujuan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (IPSASB, 2010). Informasi yang berkualitas harus memiliki karakteristik kualitatif agar berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan dan untuk tujuan pertanggungjawaban. Karakteristik kualitatif tersebut meliputi (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Salah satu unsur penting agar informasi dalam pelaporan keuangan relevan yaitu apabila pelaporan keuangan disampaikan secara tepat waktu (SAP, 2010).

Di Indonesia kepatuhan mengenai ketepatan waktu dalam menyampaikan Pelaporan keuangan telah diatur oleh perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jarak antara berakhirnya periode akuntansi sampai dengan diterbitkannya laporan hasil audit merupakan rentang waktu yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan akuntansi, hal ini juga dikatakan sebagai *audit delay* (Indriani & Terzagie, 2016). Subekti & Widyanti (2004) menyebutkan bahwa *audit delay* merupakan perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Hardini dan Sukirman (2016) mengemukakan hal yang sama yaitu *audit delay* merupakan rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Berdasarkan IHPS semester satu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari tahun 2012-2016 walaupun mengalami penurunan namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. LKPD yang terlambat disampaikan ke BPK tahun 2012 yaitu 98 LKPD kemudian meningkat menjadi 109 LKPD di tahun 2013. Tahun 2014-2016 LKPD yang terlambat disampaikan menurun yaitu berturut-turut menjadi 98, 35 dan 9 LKPD. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peraturan-peraturan mengenai ketepatan waktu belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian Pelaporan Keuangan daerah diantaranya yaitu: ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Ukuran daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*, Ukuran daerah merupakan suatu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Ukuran daerah dalam penelitian ini dilihat daribanyaknya entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin banyak entitas akuntansi yang dimiliki maka pemerintah daerah semakin mudah dalam menyusun laporan keuangannya. Opini audit juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Apabila daerah mendapat opini WTP maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan baik. Sebaliknya apabila daerah mendapat opini selain WTP maka proses pengauditan semakin panjang, hal ini dikarenakan masih adanya prosedur penelaahan lebih lanjut dan akan mengindikasikan semakin panjangnya waktu audit (Payne and Jansen, 2002).

Menurut Cohen dan Loventis (2013) semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat dan akan mengakibatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah lebih tepat waktu dan mengurangi *audit delay*. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan beberapa alasan yang telah diuraikan di atas serta untuk mendapatkan bukti empirik, maka diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan: “Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap *Audit Delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, (1) Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016?. (2) Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016? (3) Apakah tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016?. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran daerah terhadap *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. (2) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. (3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Menurut Nordiawan (2009) Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan; serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang disusun oleh suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah digunakan dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar dapat diperbandingkan dan Informasi yang terdapat didalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (2010), Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai Posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Pelaporan. SAP menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan

SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Audit

Audit secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Haryono Jusup, 2001).

Mulyadi (2002) audit merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan memberi bukti-bukti dengan cara objektif yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Arens (2008) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut.

Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan (Arens, 2008)

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses sistematis yang dilakukan secara objektif dan independen untuk mendapatkan bukti-bukti atas tindakan ekonomi yang dilakukan apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

Audit Delay

Proses dilakukannya pemeriksaan atau audit tentunya membutuhkan waktu yang pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor. Inilah yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor (Payne and Jansen, 2002)

Menurut Henderson dan Kaplan (2000) dalam penelitian Munief (2015) perbedaan antara akhir tahun buku dan tanggal laporan auditor disebut sebagai '*audit report lag*'. Dalam penelitian-penelitian lain, *audit report lag* juga disebut dengan istilah *audit delay*. Ashton, et.al (1987) mendefinisikan *audit delay* sebagai berikut: "*audit delay is the length of time from a company's fiscal year-end to the date of the auditors report*". Berarti, *audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai dikeluarkannya laporan audit. Waktu penyelesaian audit dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan auditor independen.

Ukuran Daerah

Ukuran daerah merupakan suatu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Ukuran daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan melihat jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah entitas akuntansi dianggap dapat menggambarkan ukuran suatu daerah karena daerah yang besar cenderung memiliki masalah yang lebih kompleks yang disebabkan oleh banyaknya hal yang harus diatur sehingga membutuhkan lebih banyak entitas-entitas yang mewakili setiap daerah untuk membantu menangani masalah-masalah sesuai bidang kerja yang telah ditetapkan (Hardini dan Sukirman, 2016).

Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut. Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi pemerintahan atau dapat dikatakan suatu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Seperti yang tercantum dalam PP No 8 Tahun 2004 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam pasal 1 ayat 12.

Opini Audit

Menurut Mulyadi (2002) auditor merupakan pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan. Tiono dan Yulius (2013) mengemukakan bahwa opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan proses audit, opini auditor merupakan tahap akhir dari audit dan merupakan kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan (Hardini dan Sukirman, 2016). Auditor dapat memilih jenis opini yang akan diberikan, jenis-jenis opini tersebut menurut mulyadi (2002) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu pendapatan transfer. Komponen dari pendapatan transfer pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah pusat
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
 - e. Dana otonomi khusus
 - f. Dana penyesuaian
2. Transfer Pemerintah provinsi
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Bagi hasil lainnya

Tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2010). Rasio tersebut dirumuskan berikut ini.

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Cohen dan Leventis (2013) menyatakan apabila pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan mengenai ketepatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah lambat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu laporan keuangan akan lebih tepat waktu dan *audit delay* akan berkurang.

Kerangka Konseptual

Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Audit delay

Audit delay suatu pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran daerah yang besar cenderung akan memiliki sistem manajemen informasi yang lebih baik, sumber informasi dan staf akuntansi yang lebih banyak, sistem pengendalian internal yang kuat, dan adanya pengawasan yang lebih dari investor, regulator dan juga masyarakat. Daerah yang lebih besar juga cenderung memiliki investor yang banyak sehingga akan lebih diawasi secara kritis oleh regulator dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah, oleh karena hal tersebut daerah akan berusaha untuk menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Dyer dan McHugh, 1975).

Penelitian ini besar kecilnya suatu pemerintah daerah diukur dengan banyaknya entitas akuntansi yang dimiliki oleh entitas pelapor. SAP No 17 tahun 2010 dijelaskan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu SAP juga menjelaskan yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah unit pemerintah yang menggunakan anggaran/barang oleh karena itu entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian digabungkan pada entitas pelapor.

Pemerintah daerah selaku entitas pelapor tidak perlu mencatat satu persatu transaksi penggunaan anggaran yang terjadi di dalam pemerintah daerah dan hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD yang dimiliki pemerintah daerah akan memudahkan pemerintah daerah sebagai entitas pelapor dalam menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak entitas akuntansi yang dimiliki pemerintah dapat meminimalkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dan menekan *audit delay* yang dihasilkan. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut
H1: Ukuran Daerah berpengaruh terhadap *Audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit delay

Selain itu lamanya *audit delay* juga dipengaruhi oleh opini audit yang diperoleh pemerintah daerah dari BPK. Tiono dan Yulius (2013) mengemukakan bahwa opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan proses audit, opini auditor merupakan tahap akhir dari audit dan merupakan kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan (Hardini dan Sukirman, 2016). Auditor dapat memilih jenis opini yang akan

diberikan, jenis-jenis opini tersebut menurut mulyadi (2002) yaitu WTP, WTPDPP, WDP, TW dan TMP. Sebagai organisasi pemerintahan yang baik pemerintah daerah harus melakukan pelayanan yang baik. Salah satunya yaitu dengan cara menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalkan salah saji yang dapat menyebabkan ketidakwajaran laporan keuangan sehingga opini yang didapatkan akan baik.

Opini baik yang didapatkan pemerintah daerah berupa opini WTP mencerminkan bahwa salah saji yang terdapat di dalam laporan keuangan tidak banyak ditemukan oleh auditor dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan yang baik juga mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik pula. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan akan lebih singkat maka *audit delay* yang ditimbulkan juga lebih singkat. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016.

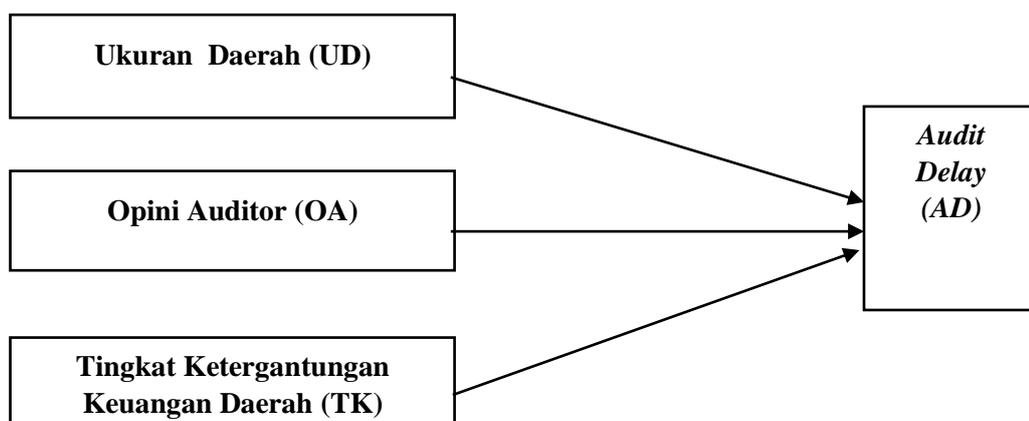
Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay

Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat.

Menurut Cohen dan Leventis (2013), pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan *audit delay* akan berkurang. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016.

Gambar 1. Kerangka konseptual



Sumber: Data olah penulis 2018

METODE

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diambil dari daftar opini LKPD yang terlampir dalam IHPS II tahun 2015 dan 2016 yang diterbitkan oleh BPK, dan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 dan 2016.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan dalam proses pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya Menggali data dari sumber sekunder untuk memperoleh data mengenai ukuran daerah, opini auditor dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Populasi dan Sempel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016 yang dalam laporan keuangannya mengungkapkan opini auditor yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam LKPD-nya mengungkapkan jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi *Method of Successive interval/MSI*, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi Linear Berganda serta Uji Hipotesis. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan *SPSS*.

Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian digunakan untuk melihat pengaruh ukuran daerah, opini auditor dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016 dengan persamaan sebagai berikut:

$$AD = \alpha + \beta_1 UD + \beta_2 OA + \beta_3 TK + e$$

Keterangan:

AD = *Audit delay*

UD = Ukuran Daerah

OA = Opini Auditor

TK = Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien ukuran daerah, opini auditor, dan tingkat ketergantungan

e = Standar Error

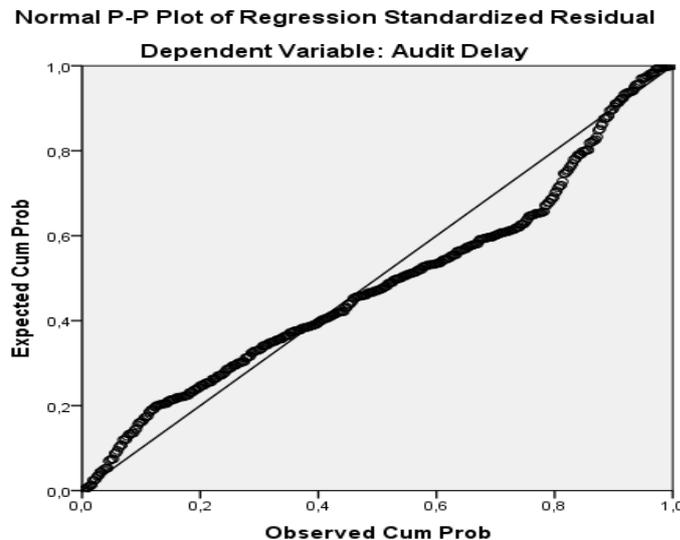
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hal ini akan dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal.

Dari uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonalnya hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS 24 diolah

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson*. Model dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Dw lebih besar dari nilai du pada tabel (Gujarati, 2003). Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Dw adalah 1,525 kemudian jika dilihat dalam tabel *durbinwatshon* nilai DL adalah 1.82811 dan nilai DU adalah 1.84771 hal ini menunjukkan bahwa nilai Dw dari hasil penelitian ini lebih kecil dari nilai DL dan DU dalam tabel *durbinwatson* dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat autokorelasi. Nilai Dw dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Ditambah Variabel Lag-AD
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,239 ^a	,057	,050	21,13569	1,525

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Opini Audit

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Output SPSS 24 diolah

Untuk mengatasi gangguan autokorelasi tersebut peneliti menambahkan lag dari variabel *audit delay* menjadi salah satu variabel bebasnya dan menguji ulang data setelah ditambah dengan lag-variabel. Hasil pengujian ulang ini diperoleh nilai Dw yang lebih besar dari nilai DL maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sudah tidak terdapat gangguan autokorelasi. Hasil pengujian ulang tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Ditambah Variabel Lag-AD
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,349 ^a	,122	,113	20,43686	2,121

a. Predictors: (Constant), Lag_AD, Ukuran Daerah, Opini Audit, Tingkat Ketergantungan

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Output SPSS 24 diolah

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian terhadap multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	187,022	8,937		20,926	,000		
Ukuran Daerah	-,081	,065	-,060	-1,235	,218	,990	1,010
Opini Audit	-,268	,113	-,116	-2,367	,018	,960	1,041
TK	-,328	,071	-,227	-4,614	,000	,958	1,044

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Output SPSS 24 diolah

Hasil pengujian multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas bernilai kurang dari 10, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali (2011). Peneliti menggunakan uji glejser dan melihat *scatterplot* (nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam data penelitian ini. Jika nilai signifikansi pada uji glejser untuk variabel independen diatas alpha (α) 5% atau 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi variabel independen di bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel ukuran daerah yaitu 0,217 lebih besar dari 0,05 artinya variabel ukuran daerah tidak terjadi heteroskedastisitas, kemudian variabel opini audit memiliki nilai signifikansi 0,061 diatas 0,05 artinya variabel ini juga tidak terdapat masalah heteroskedstisitas, dan untuk variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah yaitu 0,376 diatas 0.05 hal ini menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Hasil dari uji glejser tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,389	6,311		2,438	,015
	Ukuran Daerah	,057	,046	,061	1,237	,217
	Opini Audit	-,150	,080	-,094	-1,877	,061
	Tingkat Ketergantungan	,045	,050	,045	,887	,376

Sumber: Output SPSS 24 diolah

Analisis Regresi Berganda

Model penelitian yang dihasilkan dari pengujian analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$AD=187,022-081UD-268OA-328TK+e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (a) = 187,022 dari nilai konstanta tersebut bahwa jika setiap variabel ukuran daerah (UD), opini audit (OA) dan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah (TK) tidak ada atau sama dengan nol maka nilai dari variabel *audit delay* (AD) adalah 187,885. Artinya, jika tidak ada variabel lain yang mempengaruhi *audit delay* maka besarnya mencapai 188 hari; (2) Koefisien ukuran daerah (UD) = -0,81 menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran daerah dengan *audit delay* adalah negatif, artinya jika ukuran daerah naik 1 poin maka *audit delay* pemerintah kabupaten/kota di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0,81 hari, atau jika *audit delay* ingin diturunkan selama 1 hari maka ukuran daerah harus bertambah 1 poin; (3) Koefisien opini audit (OA) = 0,268 menunjukkan bahwa hubungan antara opini audit dengan *audit delay* adalah negatif, artinya apabila opini audit meningkat 1 poin maka *audit delay* di kabupaten/kota di Indonesia akan mengalami penurunan selama 0,268 hari, atau jika *audit delay* ingin diturunkan selama 1 hari maka opini audit harus di naikkan sebesar 4 poin; (4) Koefisien dari variabel tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah adalah 0,328 berarah negatif, hal ini berarti jika variabel tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan sebanyak 1 persen maka *audit delay* akan mengalami penurunan selama 0,32 hari. Dengan kata lain jika *audit delay* ingin diturunkan selama 1 hari maka tingkat ketergantungan keuangan daerah harus ditingkatkan 3 persen.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan)
 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11015,532	3	3671,844	8,220	,000 ^b
	Residual	181367,319	406	446,718		
	Total	192382,851	409			

a. Dependent Variable: Audit Delay

b. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Opini Audit

Sumber: Output SPSS 24 diolah (2018)

Berdasarkan tabel hasil uji simultan diperoleh nilai F sebesar 8,220 dengan tingkat signifikansi 0,000 nilai tersebut terbukti lebih kecil dari α (0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit delay*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,239 ^a	,057	,050	21,13569	1,525

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Opini Audit

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Output SPSS 24 diolah(2018)

Nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) dari tabel adalah sebesar 0,050 atau 5% hal ini berarti bahwa variasi variabel ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah mampu menjelaskan variabel *audit delay* sebesar 5% dan sisanya 95% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

**Tabel 7. Hasil Uji T (Uji Parsial)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	187,022	8,937		20,92	,000
	Ukuran Daerah	-,081	,065	-,060	-1,23	,218
	Opini Audit	-,268	,113	-,116	-2,36	,018
	Tingkat Ketergantungan	-,328	,071	-,227	-4,61	,000

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Opini Audit

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Output SPSS 24 diolah

Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi t untuk variabel ukuran daerah 0,218 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak atau dapat diartikan bahwa secara parsial variabel ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Nilai signifikansi t dari variabel opini audit lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,018 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima yang dapat diartikan bahwa secara parsial variabel opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Tingkat ketergantungan keuangan daerah memperoleh nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga H3 diterima dan H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Audit Delay

Ukuran daerah merupakan suatu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Penelitian ini besar kecilnya suatu daerah dilihat dari jumlah entitas akuntansi yang merujuk pada jumlah SKPD yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Hasil penghitungan menunjukkan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi hasil pengujian tersebut maka hipotesis H1 yang menyatakan ukuran daerah berpengaruh terhadap *audit delay* ditolak

dan berarti bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Destiani (2012), Munief dan Suranta (2015) serta Rahmawati (2016).

Jumlah entitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan semakin sedikitnya jumlah entitas akuntansi tidak selalu berakibat pada semakin cepatnya waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah entitas akuntansi yang terlalu sedikit akan mengakibatkan bertambahnya beban pada setiap entitas sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi kurang efektif. Selain itu besarnya suatu entitas maka akan semakin besar pula cakupan audit yang diperlukan dan mengakibatkan proses pengauditan semakin lama. Oleh karena itu besar kecilnya suatu daerah dapat dikatakan tidak mempengaruhi lamanya penyampaian laporan keuangan dan juga lamanya *audit delay* (Munief dan Suranta, 2015).

Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit delay*

Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan proses audit (Tiono dan Yulius, 2002). Hasil dari penghitungan menunjukan nilai signifikan t yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan, sehingga H_2 yang menyatakan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* diterima dan dapat diartikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2015), Sigit Wahyu Kartiko dan Fitriany Sylvia Veronika.NP Siregar (2015) serta Ni Nengah Devi Aryaningsih dan I Ketut Budiarta (2014).

Menurut Hardini dan Sukirman (2015) opini audit WTP dapat meminimalkan *audit delay*, hal ini dikarenakan semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah menandakan bahwa suatu pemerintah daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan menyusun laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalkan *audit delay*. Selain itu menurut Aryaningsih dan Budiarta (2014) pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP akan menyebabkan terjadinya *audit delay* yang panjang hal ini karena diperlukannya pencarian bukti-bukti dan temuan-temuan audit lebih lanjut oleh auditor.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap *Audit delay*

Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan diterimanya H_3 yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014) serta Rahmawati (2016).

Menurut Muladi (2014) semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat meminimalkan terjadinya *audit delay*. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat berupa penundaan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga setiap pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi akan berusaha untuk patuh dan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan ke BPK dengan tepat waktu maka hal ini akan meminimalkan terjadinya *audit delay*. Jadi

semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah akan semakin singkat *audit delay* yang dihasilkan.

PENUTUP

Simpulan

Ukuran Daerah yang diproksikan dengan jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap *audit delay* Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016. Ukuran daerah tidak berpengaruh karena banyak sedikitnya jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak menjamin semakin cepatnya waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan maupun audit.

Opini audit terbukti berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016. Menurut Hardini dan Sukirman (2015) opini audit WTP dapat meminimalkan audit delay, hal ini dikarenakan semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah menandakan bahwa suatu pemerintah daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan menyusun laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalkan audit delay.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. Menurut Muladi (2014) semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat meminimalkan terjadinya *audit delay*. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat berupa penundaan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga setiap pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi akan berusaha untuk patuh dan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan ke BPK dengan tepat waktu maka hal ini akan meminimalkan terjadinya *audit delay*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Bagi peneliti selanjutnya Variabel bebas dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 2,9% variabel terikat, Dengan demikian sisanya 97,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel-variabel lain yang diduga akan berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Mengingat rata-rata *audit delay* di tahun 2015 adalah 133 hari kemudian meningkat menjadi 152 hari di tahun 2016, diharapkan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas kerjanya agar dapat mengurangi tenggang waktu *audit delay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Elder and Beasley, (2008). “*Auditing dan Jasa Assurance*”, Alih Bahasa Gina Gania, Edisi Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Belkaoui, A.R., (2008). “*Accounting Theory*” Firth Editions, Singapura: Cengage Learning Asia Fasific Ltd

- Cohen, S., & Leventis, S., (2013). "Effects of Municipal, Auditing Political Factors on Audit Delay", Dalam *Accounting Forum*, Vol 37. Thessalonki: International Hellenic University.
- Dyer, J. C., & McHugh, A. J. (1975). The timeliness of the Australian annual report. *Journal of Accounting Research*, 204-219.
- Hardini, Z. G., & Sukirman, S. (2016). Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Indriani, P., & Terzagie, T., (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Kasus Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014). *Profita: Komunikasi Ilmiah AKuntansi dan Perpajakan*, 9(3). 327-338. DOI: https://dx.doi.org/10.22441/profita_v9.3.01
- International Public Sector Accounting Standards Boards. (2010). *Conceptual Framework For General Purpose Financial Reporting By Public Sector Entities*. The International Federation Of Accountants (IFAC)
- Itsniawan, A.M., & Suranta, S., (2016). Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *SNEMA-2015*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Jusup, A. H. (2001). *Auditing (Pengauditan) Buku 1*. STIE YKPN: Jogjakarta.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muladi, A., & Sudarno, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)..
- Mulyadi. (2002). *Auditing Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., Putra, S., & Rahmawati, M., (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Payne, J. L., & Jensen, K. L. (2002). An examination of municipal audit delay. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21(1), 1-29.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Rahmawati, Z., & Aris, M. A. (2016). Audit Delay dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)..
- Subekti, I., & Widiyanti, N. W. (2004). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 7(1), 991-1002.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Tiono, I., & Yulius Jogi C. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi AuditReport Lag di Bursa Efek Indonesia". Dalam *Business Accounting Review*. Vol 1 No 3. Surabaya: Universitas Kristen Petra
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah